



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 875/VIII/2015

II/AGUSTUS 2015



DESENTRALISASI PEMBANGUNAN PERCEPAT PEMERATAAN

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id



DESENTRALISASI PEMBANGUNAN PERCEPAT PEMERATAAN



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat menjadi fungsi stabilisasi agar pemerintah dapat menstabilkan perekonomian serta mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Demikian ditegaskan Ketua DPR RI Setya Novanto saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I

Tahun Sidang 2015-2016, dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara, Jumat (14/08/15).

“Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga pasokan dan kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok serta mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan berbagai kebijakan baru agar mampu berperan dalam perekonomian nasional bukan saja sebagai mesin per-

tumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja,” jelas Novanto.

Politisi F-PG ini menambahkan, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi itu harus terus didorong. Sehingga akan mempercepat proses pemerataan pembangunan. Agar pembangunan semakin merata, DPR terus mendukung penambahan alokasi Dana Desa.

“DPR mengingatkan agar Pemerintah benar-benar mengawasi dan menjaga realisasinya agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai,” imbuh Novanto.

Sementara terkait kebijakan APBN, khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, tambah Novanto, DPR menghimbau agar dilaksanakan revalidasi data, dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat ter-

capai dan program subsidi akan tepat sasaran.

Dalam kesempatan ini, Novanto juga menyoroti penyerapan anggaran pemerintah pusat khususnya belanja Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui, penyerapan anggaran Pemerintah pada Semester I Tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama yaitu baru sebesar Rp 208,5 triliun atau 26,2 persen.

“DPR mendorong agar Kementerian/Lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur sehingga penyerapan di Semester II Tahun 2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” harap Politisi asal Dapil NTT itu.

Novanto menjelaskan, selain pidato

pembukaan Masa Persidangan, Rapat Paripurna juga diisi agenda Pidato Presiden tentang Penyampaian atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Nota Keuangan.

“Pidato ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran DPR dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” jelas Novanto.

Novanto memastikan, RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya dapat diajukan oleh Presiden.

“Hal inilah yang menjadi dasar dari munculnya konvensi ketatanegaraan Pidato Presiden tentang Penyampaian atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan pada setiap bulan Agustus,” tutup Novanto. (sf) foto: jaka/parle/hr

DPR Dukung Politik Luar Negeri Indonesia



Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan Pidato Masa Sidang I Tahun Sidang 2015-2016

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan, DPR dengan peran diplomasi yang dimiliki akan senantiasa mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di fora internasional, khususnya di fora antar parlemen.

Hal tersebut disampaikan Novanto dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (14/08/2015)

Ia menyatakan, perkembangan hubungan internasional saat ini patut mendapat perhatian DPR, terlebih lagi dengan posisi dan peran Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat regional dan global. Seperti terlihat dari sejumlah kunjungan kepala negara atau pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara sahabat

ke Indonesia belakangan ini.

“Terkait hal tersebut, DPR dengan peran diplomasi yang dimilikinya akan senantiasa mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di fora internasional, khususnya di fora antarparlemen,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam masa persidangan ini, DPR akan berperan sebagai penyelenggara beberapa fora antarparlemen, seperti Sidang *Asian Parliamentary Assembly Standing*

Committee on Economic and Sustainable Development yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19-20 Agustus 2015 dan Sidang ke-6 *The Global Conference of Parliaments Against Corruption (GOPAC)* yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 6-8 Oktober 2015.

“Hal ini adalah wujud langsung dari penguatan fungsi parlemen dalam diplomasi dunia”, tandasnya. (Tim) foto: *naefuroji/parle/hr*

FADLI ZON BERHARAP RESHUFFLE KABINET MENJADIKAN PEMERINTAHAN LEBIH BAIK



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut mengomentari perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa saat lalu di Istana Negara Jakarta.

Fadli Zon menilai, bahwa *reshuffle* kabinet ini agak terlambat, seharusnya dilakukan beberapa waktu lalu. Fadli juga berharap, agar mereka yang terpilih sebagai menteri, dapat membuat pemerintahan Jokowi menjadi lebih baik lagi.

“*Reshuffle* kabinet ini agak terlambat, seharusnya Presiden melakukannya beberapa waktu lalu, terutama perombakan pada menteri di bidang ekonomi, jadi *reshuffle* kabinet sangat tanggung,” jelas Fadli kepada wartawan di Gedung DPR Rabu (12/08/2015). Fadli juga mengkritik Presiden Jokowi,

yang tidak melihat kementerian yang sebenarnya tidak mendukung kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

“Seperti kementerian perhubungan, dimana kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan justru sering menghambat pelaku ekonomi, begitu pula dengan Menteri Keuangan yang sering menyulitkan pelaku pasar, dan juga Menpora yang justru membuat kekisruhan sepakbola tanah air semakin tidak menentu, begitu pula dengan Menteri ESDM yang selalu menyulitkan rakyat, sementara untuk bidang hukum, Menkumham yang selalu membuat kegaduhan, tidak diganti,” cetus Fadli. (as) foto: *jaka/parle/hr*

DPR Dorong Kerjasama Industri dan Dagang Indonesia-Taiwan

Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) Agus Hermanto menerima delegasi *Taipei Economic Trading Office (Teto)* Yunchung Tsai. DPR mendorong peningkatan kerjasama bidang Industri dan Perdagangan antara Indonesia dengan Taiwan.

“Hubungan dagang Indonesia-Taiwan sudah cukup terjalin sehingga apabila ini ditingkatkan akan membawa keuntungan bagi Indonesia juga,” kata Agus Hermanto, Selasa (11/08/2015), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Pada tanggal 27-29 Agustus 2015, akan datang delegasi dari Taiwan ke Indonesia, ingin melaksanakan kerjasama di bidang industri. Antaranya industri telepon dengan Timobile, dan kerjasama industri baja akan ada *aggrement* antara perusahaan baja di Indonesia dan Industri baja di Taiwan.

Agus membenarkan memang betul Indonesia dengan Taiwan belum ada hubungan diplomatik, namun hubungan dagang keduanya cukup tinggi. Tercatat di Taiwan, pekerja Indonesia ada 230 ribu orang.

“Hubungan dagang Indonesia Taiwan sudah cukup terjalin, sehingga apabila ini ditingkatkan akan membawa keun-



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

tungan bagi Indonesia juga,” ungkapny.

Selain itu, politisi Partai Demokrat dapil Jawa Tengah ini, menuturkan misalnya akan ada pabrik *handphone* yang berproduksi di Indonesia. Dijelaskan sekarang ini semua *handphone* yang digunakan di Indonesia berasal dari impor.

Menurut Agus, pasar Indonesia cukup luas, tenaga kerja kita juga cukup tersedia, yang dibutuhkan ialah *investment* dan teknologi, sehingga untuk menambah rasa nasionalisme dengan menggunakan *handphone* produksi Indonesia,

walaupun teknologinya dari asing namun diproduksi di sini.

“Dia (Taiwan) membawa *investment* dan teknologi, kita mempunyai sarana semuanya apabila ini diwujudkan akan sangat menguntungkan kedua belah negara,” tegasnya.

Terkait kerjasama di bidang otomotif, Taiwan ingin membuat mobil dengan merek Indonesia sebab melihat pasar yang begitu luas. Mereka menawarkan Indonesia bisa memiliki mobil produk Indonesia. (as) foto: *ivan armanias/parle/hr*

Ketua DPR Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2015



Ketua DPR Setya Novanto didampingi isteri menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional 2015 di Bogor

Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2015 diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor. Perwakilan Anak Indonesia dari ujung Sumatra hingga ujung timur Papua turut meramaikan puncak peringatan Hari Anak Nasional. Halaman belakang Istana Bogor pun disulap penuh dengan atribut anak-

anak, sehingga menyemarakkan acara tersebut. Tema perayaan kali ini adalah ‘Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak’.

Ketua DPR Setya Novanto didampingi Istri Deisti A Novanto turut menghadiri perayaan ini di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa

(11/8/2015). Hadir juga dalam acara itu para Menteri Kabinet Kerja dan para Pimpinan Lembaga Negara serta beberapa Kepala Daerah seperti Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DIY Yogyakarta serta Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sebuah panggung dengan layar besar dihadirkan di halaman belakang Istana yang rindang dengan dihiasi ornamen-ornamen khas anak. Mulai dari miniatur gajah, zebra, harimau dengan konsepnya yang sangat menarik. Ada juga ornamen kuda lumping. Panggungnya menggunakan tema hutan.

Presiden Jokowi dalam sambutannya, meminta agar seluruh anak bisa mencintai kesenian Indonesia dan terus bisa melestarikan lingkungan. Selain itu Jokowi mendoakan agar anak-anak Indonesia sukses selalu.

Dalam acara tersebut, Jokowi juga membagi-bagikan sepeda. Namun ada syaratnya, mereka harus bisa menjawab pertanyaan ‘formalistik’ dari Jokowi. Meski demikian, anak-anak ini sangat antusias. Mereka berebut untuk bisa dipilih Jokowi maju ke depan.

(skr) foto: *denus/parle/hr*

DPR TUAN RUMAH SIDANG PARLEMEN ASIA

DPR RI mendapat kehormatan menjadi tuan rumah sidang *standing committee Asian Parliamentary Assembly* (APA) yang membahas tentang sejumlah isu bidang ekonomi. Kegiatan yang dijadwalkan akan dihadiri oleh anggota parlemen dari 17 negara berlangsung tanggal 19-20 Agustus 2015 di Inter Continental Mid Plaza Hotel, Jakarta.

“DPR saat ini adalah Ketua Bidang Ekonomi APA, sekaligus mendapat kehormatan jadi tuan rumah *standing committee*. Ada 80 anggota delegasi yang akan hadir dalam

sidang dan lebih spesial dihadiri pula oleh tiga orang wakil ketua parlemen,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/15).

Ia menambahkan sidang mengusung tema utama ‘*Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity*’ - Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Berkesinambungan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers

Disamping itu tambah politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini sejumlah isu penting juga akan menjadi perhatian diantaranya bagaimana membangun energi yang terintegrasi di kawasan Asia, upaya mengentaskan kemiskinan, pemanasan global dan isu lingkungan lainnya.

“Masalah *currency*, dinamika nilai tukar uang yang terjadi di banyak negara serta perlambatan ekonomi secara global tentu juga akan disinggung,” lanjut Fadli Zon yang dalam sidang ini akan bertindak selaku Ketua Delegasi Indonesia.

Data yang berhasil dihimpun dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR yang bertindak selaku panitia penyelenggara, 16 negara peserta diantaranya adalah China, Siprus, Iran, Kuwait, Pakistan, Thailand, Bangladesh, dan Kamboja.

Sejumlah tokoh ekonomi juga akan didengar paparannya yaitu Dr. Rizal Ramli yang baru saja diangkat menjadi Menko Kemaritiman dan Prof Sudrajad Djwandono dari Nanyang Technological University Singapore. Hasil sidang di Jakarta ini akan dibawa pada Pertemuan APA ke-8 yang dijadwalkan berlangsung di Kamboja. (iky) foto: jaka/parle/hr

HARUS ADA INVESTIGASI MENYELURUH

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta ada investigasi menyeluruh terkait kelangkaan dan mahal nya daging sapi. Posalnya, akibat kelangkaan daging sapi ini, selain pedagang daging mogok berjualan, masyarakat dirugikan dengan mahal nya harga daging. Harga daging melonjak hingga menyentuh angka Rp 120 ribu per kg.

“Harusnya ada investigasi menyeluruh, sekali untuk seluruhnya. Penegakan hukum harus diimbangi dengan perbaikan sistem. Sistem informasi ekspor impor selama ini tidak kunjung membaik. Kemarahan para pedagang sekarang ini harus dimaknai seperti itu,” tegas Fahri, usai acara Pembekalan Tenaga Ahli DPR, di Gedung Nusantara, Senin (10/08/15).

Politisi F-PKS ini menegaskan, Pemerintah harus membaca permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus kelangkaan daging sapi ini. Sehingga ditemukan apa permasalahan yang selama ini terjadi, dan tidak muncul masalah yang sama di kemudian hari.

“Dulu sudah tidak ada masalah seperti ini, tapi ini muncul lagi. Artinya kondisi negeri ini semakin parah,” prihatin Politisi asal Dapil NTB ini.

Pada hal, jika menilik dalam sepuluh tahun terakhir, Fahri menilai ada upaya swasembada yang masif, yakni produksi petani dan peternak lokal meningkat. Sehingga, sejalan dengan meningkatnya produksi para peternak itu, maka impor pangan akan menurun.

“Namun, jika produksi peternak itu meningkat dan keran impor itu tetap dibuka banyak, menyebabkan suplai daging sapi membanjiri pasar, maka harga jual akan jatuh. Biasanya akan menjadi disinsentif bagi peternak. Sekarang tidak dilakukan impor, karena untuk menjaga stabilitas harga,” imbuh Fahri.

Fahri berharap, Pemerintah segera melakukan investigasi secara menyeluruh, terutama pada Kementerian Perdagangan. Ia menilai permasalahan tidak berhubungan dengan



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Kementerian Pertanian, karena permasalahan stok daging sapi ini lebih banyak di Kemendag.

“Karena yang memberikan izin itu Kemendag, izin impor itu juga datangnya dari Kemendag, bukan Kementan. Kementan itu tugasnya memproduksi. Selama 10 tahun ini, kinerja Kementan cukup sukses. Masalahnya ini di permainan impor, dan itu wilayah Kemendag,” tegas Fahri.

Fahri menegaskan, pihaknya akan memanggil Menteri terkait permasalahan ini. Menteri itu harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. (sf) foto: jaka/parle/hr

Belanda Harus Akui Secara De Jure Kemerdekaan Indonesia



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam acara Seminar Kebangsaan

Pemerintah Indonesia seharusnya meminta pengakuan secara *de jure* dari Pemerintah Belanda atas Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pasalnya, Pemerintah Belanda selama ini mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di sela-sela seminar kebangsaan bertema 'Belanda Belum Mengakui De Jure Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bagaimana Sikap Kita?', di Operation Room, Gedung Nusantara, Rabu (12/08/15).

"Pengakuan itu bukan pernyataan secara informal saja, tapi pengakuan secara formal. Pengakuan secara *de jure* dari Belanda, bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Itu harus dalam pernyataan yang resmi dan dalam sebuah dokumen juga," tegas Fadli.

Politisi F-Gerindra ini menambahkan, pengakuan secara *de jure* atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ini sangatlah penting bagi Indonesia. Mengingat, hal ini terkait dengan karakter Bangsa Indonesia dan janji Indonesia terhadap para pejuang.

"Kalau kita ingin memperjuangkan *character national building* kita, ini kan melihatnya dari sejarah. Nah sejarah yang benar ini, termasuk hubungan

kita dengan mantan penjajah kita harus dijelaskan," imbuh Fadli.

Fadli menganggap tidak maunya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 karena Belanda khawatir, aktifitas Belanda pada 1945 sampai 1949 terbongkar. Pasalnya, dalam kurun waktu 4 tahun itu, Belanda bisa dikatakan melakukan agresi militer kepada Indonesia.

"Agresi itu adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, apalagi sudah cukup banyak korbannya di beberapa daerah. Mulai dari Yogyakarta, sebagai daerah pusat Ibukota negara kala itu. Kemudian di Rawa Gede, Karawang, yang juga ada peristiwa yang cukup menonjol. Kemudian, daerah lain meliputi Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan daerah-daerah lainnya," jelas Fadli.

Politisi asal Dapil Jawa Barat ini mengingatkan Pemerintah untuk tetap memperjuangkan pengakuan dari Belanda ini. Sementara pihaknya, akan selalu mengingatkan Pemerintah untuk mendorong hal ini.

Namun, tambah Fadli, walaupun Pemerintah Belanda belum mengakui secara *de jure*, namun ia mengingatkan untuk tetap menjaga persahabatan bilateral dengan negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari 3,5 abad ini.

"Di dalam hubungan bilateral kedua

negara ini tentu kita harus menjaga persahabatan kita. Tapi Belanda juga harus tahu, kita melihat hal ini (pengakuan *de jure*) sebagai hal yang penting," tutup Fadli.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Komite Utang Kehormatan Belanda, Batara R. Hutagalung, menyatakan hingga saat ini, Pemerintah Belanda tidak mau mengakui secara *de jure* kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

"Untuk Pemerintah Belanda, kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949, yaitu ketika Pemerintah Belanda melimpahkan kewenangan pemerintahan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS)," jelas Batara.

Batara menambahkan, Pemerintah Belanda juga tidak mau meminta maaf atas seluruh peristiwa pembantaian terhadap penduduk sipil di Indonesia selama agresi militernya dibantu oleh sekutunya, antara tahun 1945-1949.

Dalam acara ini, hadir pula narasumber lain, yakni Hikmahanto Juwana (Guru Besar Universitas Indonesia), Saafroedin Bahar (Dosen Universitas Gadjah Mada), dan Muhammad Iskandar. (sf) foto: andri/parle/od



Tenaga Ahli Menjadi Dukungan Bagi Anggota Dewan



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Tenaga Ahli (TA) menjadi bagian yang penting dalam mendukung aktifitas Anggota Dewan dalam melaksanakan kerjanya. TA pun menjadi bagian dari *supporting system* bagi Anggota Dewan, serupa dengan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah usai membuka dan memberikan materi pada acara Orientasi atau Pembekalan Tenaga Ahli dalam Rangka Meningkatkan Dukungan Keahlian kepada DPR, di Ruang KK II, Gedung Nusantara, Senin (10/08/15).

“Tenaga Ahli adalah otak tambahan Anggota Dewan. Seperti sistem pendukung bagi pengelolaan dewan yang harus semakin transparan dan terbuka sehingga masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh dewan secara terus-menerus,” kata Fahri.

Politisi F-PKS ini menambahkan, baru kali ini di DPR, sistem pendukungnya semakin banyak. Namun, Fahri menyayangkan status TA yang belum permanen di DPR. Sehingga, ketika periode DPR berganti, maka TA juga berganti.

“Status mereka (TA) belum permanen, artinya status sebagai sistem pendukung sama dengan keberadaan Anggota. Tetapi karena keberadaan mereka penting maka mereka harus dilatih, dibimbing dan dikembangkan sehingga menjadi sistem pendukung yang maksimal dan profesional,” imbuh Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini.

Dalam kesempatan ini, Fahri juga sempat menceritakan pengalamannya ketika menjadi TA di MPR. Ia menceritakan

berbagai suka duka saat menjadi TA. Fahri juga memberikan materi tentang Parlemen Modern. Ia juga berjanji akan memperkuat posisi TA di DPR.

“Nanti akan ada Undang-undang Sistem Pendukung, sehingga TA mempunyai *power* yang lebih *legitimate*,” janji Fahri.

Sementara itu sebelumnya, Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dalam sambutannya mengajak para TA untuk selalu semangat dalam mendukung kinerja Anggota Dewan. Mengingat, fungsi TA merupakan bagian dari *supporting system* kepada Anggota Dewan.

Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti, juga mengatakan, setiap tahunnya akan menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada para TA. Juga jika termasuk ada isu penting terkait dengan TA, akan disosialisasikan kepada para TA.

Ditemui usai acara, Buchari, salah seorang TA Fraksi PDI-Perjuangan, menyambut baik acara pembekalan kepada TA ini. Pasalnya, ini untuk kepentingan khususnya kepada TA, dan DPR pada umumnya. Namun, ia memberi catatan, beberapa fungsi di Parlemen ini perlu dukungan sistem yang maksimal.

“Kegiatan seperti ini penting. Tapi yang lebih penting itu acara berlangsung secara *sustainable*, bukan hanya kegiatan sesaat yang tidak berlanjut. Mengingat beban dan fungsi tugas yang maksimal ini, maka tentu harus ada program secara berkesinambungan yang diberikan kepada TA,” kata TA dari Anggota Komisi III, Muslim Ayub ini.

Terkait dengan Parlemen Modern, Buchari menekankan bukan hanya dalam bentuk kemampuan Sumber Daya Manusia, yakni TA saja, tapi juga fasilitas. Ia meminta fasilitas yang dibutuhkan TA agar dilengkapi, sehingga dapat mendukung kinerja TA.

“Parlemen yang modern, tentu juga perlu didukung TA yang modern. Juga segala fasilitas yang kami butuhkan, agar oleh Kesetjeraan DPR dapat difasilitasi. Sehingga apa yang menjadi pekerjaan TA, dapat dimaksimalkan,” harap Buchari.

Pembekalan kepada TA akan berlangsung selama 3 hari, yakni 10-13 Agustus 2015. Materi juga akan diberikan oleh Anggota Dewan dan Pimpinan Setjen DPR RI. (sf) foto: jaka/parle/hr

70 Tahun RI, Bukan Era Keemasan Tapi Keprihatinan

Di usia 70 tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini bukan merupakan era keemasan tapi keprihatinan. Meski demikian, dalam peringatan HUT kali ini merupakan momentum untuk melakukan evaluasi dalam membangun demokrasi yang tidak menyeng-

sarakan rakyat.

“Ini merupakan era memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, dilihat dari fakta saat ini dimana rakyat berada dalam kondisi sulit,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo kepada Parlemen berkaitan peringatan

HUT 70 RI.

Menurutnya, sekarang ini dolar AS sudah mencapai level Rp 13.700, petani mengeluh karena semuanya impor, rakyat juga sulit mendapatkan pekerjaan. Karena itu, harap Firman, cegah perpecahan dengan pendekatan



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo foto bersama Anggota DPR lainnya

kerja keras untuk menyejahterakan rakyat.

Situasi seperti ini, tegas politisi Partai Golkar ini, harus diwaspadai. Selain TNI harus mengoptimalkan pertahanan, Polri meningkatkan keamanan, pemerintah harus terus berupaya menyejahterakan rakyat.

“Kita lihat saja, petani tebu menjerit karena impor, ternak dimatikan oleh

kaum kapitalis dan liberalis. Kalau pemerintah tidak cekatan menyikapi kondisi ini, saya kira bisa terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1997,” terangnya.

Melihat kenyataan sekarang ini tidak mungkin bisa menjadi era keemasan. “Dolar AS di atas Rp13.700, dolar Singapura Rp.9.750. Hari ini saja masalah ketahanan pangan kita belum terca-

pai. Nelayan sudah bangkrut akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kalau pekerja buruh kita dan pelaku usaha dibebani pungutan, ini menunjukkan kita belum berhasil,” ujar Firman.

Selain itu, sambung dia, terjadinya insiden pembakaran mesjid dan pengibaran bendera Israel di Tolikara, Papua merupakan akibat pemahaman ideologi Pancasila yang sudah jauh ditinggalkan rakyat kita. “Disintegrasi jangan sampai terjadi, tapi kalau tidak terkendali ini bisa berbahaya. TNI dan Polri harus bisa mencegah. Disintegrasi bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Karena Indonesia punya pangsa pasar. Ini adalah persaingan ekonomi global, kalau tidak siap kita akan digulung,” ujarnya.

Anggota Dewan ini mengkhawatirkan instabilitas politik kita sudah masuk lampu merah. “Nanti kalau terjadi instabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan, akan berbahaya. Karut marut pilkada ini kan terjadi karena ketidaktegasan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” pungkasnya. (sc/dhi) foto: iwan armanias/parle/od

SDM BERKUALITAS SUMBER KEMAJUAN BANGSA



Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi sumber kemajuan bangsa. Indonesia harus memiliki SDM berkualitas tersebut untuk menyambut tantangan masa depan dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Demikian penegasan Ketua MPR RI

Zulkifli Hasan saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR 2015, Jumat (14/8). “Kunci kemajuan bangsa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangan masa depan Indonesia memang terletak pada kemampuan sumber daya manusia yang kompetitif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang terutama dalam bidang-bidang yang strategis, seperti teknologi pangan, teknologi energi, dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara.”

Saat ini, lanjut Zulkifli, bidang teknologi pangan, energi, dan transportasi sudah menjadi kebutuhan mendesak dan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia yang sudah lebih dari 200 juta jiwa tentu membutuhkan kemajuan energi dan pangan. Sementara terhadap kebutuhan teknologi transportasi, lebih

didasari pada geografis Indonesia yang didominasi perairan.

“Kebutuhan transportasi jelas amat diperlukan, karena Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, yang membutuhkan wahana transportasi, selain kapal dan kereta api, juga pesawat terbang, yang dapat menghubungkan berbagai wilayah dengan cepat, aman, dan murah,” ungkap Zulkifli lagi.

Pengembangan dan penguasaan ketiga teknologi tersebut, dengan sendirinya akan mendorong produktifitas dan inovasi nasional. Selain itu, lapangan kerja juga akan terbuka lebar. Saat yang sama penguasaan tiga teknologi ini mampu membangun SDM berkemampuan tinggi, meningkatkan devisa, memperbaiki neraca perdagangan, dan meningkatkan pendapatan negara. (mh) foto: iwan armanias/parle/od

LINDA MEGAWATI PERTANYAKAN KLAIM PRESIDEN INDEKS DEMOKRASI MENINGKAT

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan yang dibacakannya di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI mengklaim bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 73,04, yang artinya meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar 63,72.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Linda Megawati malah mempertanyakan tolak ukur dari Indeks Demokrasi yang dibacakan Jokowi tersebut. Ia menilai Demokrasi yang terjadi saat ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, bahkan cenderung menurun.

“Dilihat dari mana Indeks Demokrasi kita sekarang meningkat? Saya lihat tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Malah rencana pengembalian pasal-pasal penghinaan presiden itu bisa membuat kecenderungan demokrasi

menurun. Pasalnya itu menjadi sebuah bukti pembatasan demokrasi,” jelas Linda.

Meski demikian, menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, wajar saja jika pemerintah mengklaim seperti itu. Namun tentunya penilaian akhir ada pada masyarakat. Karena masyarakat lah yang merasakan langsung berbagai bentuk kebijakan yang disusun pemerintah.

Lebih lanjut, Linda berharap ke depan demokrasi bangsa dapat lebih maju, bebas dan bertanggung jawab. Sementara itu Jokowi dalam pidatonya mengatakan saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. (Ayu)

foto: rizka/parle/od



Anggota Komisi VIII DPR Linda Megawati

Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Kritisi Kondisi Perekonomian Indonesia



Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD saat Sidang Bersama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Ketua DPD RI, Irman Gusman mengkritisi situasi bangsa Indonesia, terutama kondisi perekonomian yang dinilai kurang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, Presi-

den Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (14/8) di Gedung Nusantara Senayan Jakarta.

“Dalam beberapa waktu belakangan, bangsa kita menghadapi situasi yang kurang menggembirakan terutama di bidang ekonomi, pertumbuhan

ekonomi yang cenderung melambat, nilai tukar rupiah melemah, penerimaan pajak tidak mencapai target, sementara angka kemiskinan dan pengangguran meningkat,” ujar Irman dalam pidatonya.

Dilanjutkannya, kondisi tersebut di-

perberat oleh lambannya penyerapan APBN dan APBD yang semestinya mendorong penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Dalam kondisi tersebut, beban rakyat diperberat dengan kenaikan harga barang-barang pokok termasuk bahan pangan seperti beras dan daging.

Bahkan, di sisi lain dikatakan Irman, kesenjangan ekonomi semakin melebar yang dibuktikan dengan kian membesarnya angka gini rasio dari tahun ke tahun. Disamping ketimpangan pendapatan negara, juga terjadi kesenjangan antar daerah dan antar wilayah di Indonesia. Lebih dari separuh produksi nasional dihasilkan di Pulau Jawa, dua puluh persen di Sumatera dan kurang dari seperempat persen

dihasilkan oleh kawasan timur yang lebih luas. Padahal kawasan timur Indonesia sangat kaya dan sumber daya alam.

“Kondisi tersebut patut menjadi perhatian kita semua, supaya jangan sampai terjadi bak pepatah *ayam bertelur di atas lumbung mati kelaparan, itik berenang di air mati kehausan*,” kata Politisi dari Partai Demokrat ini.

Solusi atas semua permasalahan itu sejatinya tidak perlu dicari jauh-jauh, karena sudah diatur dalam UUD 1945 terkait sistem perekonomian nasional. Tinggal bagaimana melaksanakan amanat konstitusi itu secara taat azas. (Ayu)

foto: andi/parle/hr

RAPBN 2016 RP2.121,3 TRILIUN



Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2016

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, menyebutkan, mengalokasikan Rp2.121,3 triliun. Angka ini meningkat dari APBN Perubahan 2015 yang sebesar Rp1.319 triliun.

Pidato Presiden itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (14/8). Alokasi RAPBN 2016 tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun dan transfer daerah Rp558,7 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp780,4 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp558,7 triliun.

Pemerintah yang kini sedang giat mempercepat pembangunan infrastruktur, tentu telah mengalokasikan anggarannya yang signifikan. Pemerintah mengalokasikan 8,0 persen dari nilai RAPBN tersebut untuk infrastruktur.

“Dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp313,5 triliun atau 8,0 persen. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN-P tahun 2015. Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik,” kata Presiden Jokowi. (mh) *foto: andi/parle/hr*

Hardisoesilo Saksikan Kontes Ternak Bondowoso

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo menyempatkan dalam rangkaian kunjungan kerja pribadinya menyaksikan kontes ternak yang merupakan acara tahunan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, untuk menggairahkan para peternak sapi dalam mengembangkan usaha ternak mereka.

Disela-sela kunjungan kerja ke daerah pemilihannya di Jawa Timur III yang meliputi Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo, Rabu (5/8), Hardisoesilo mengatakan bahwa kontes ternak yang rutin diselenggarakan setiap tahun itu merupakan wahana positif bagi masyarakat setempat, khususnya para peternak sapi, untuk

mengembang-biakkan sapi-sapi mereka.

“Kontes ini menghadirkan sapi-sapi terbaik dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso dan karenanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi para peternak apabila sapi mereka berhasil keluar sebagai pemenang dalam kontes ini,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut.

Melalui kegiatan tersebut, para peternak Bondowoso diharapkan lebih terpacu dalam membudidayakan ternak mereka, tidak hanya dalam hal meningkatkan jumlah populasi sapi saja tetapi juga berinovasi dalam pengembangan sapi berkualitas hasil kawin silang melalui inseminasi buatan (IB).



Anggota Komisi IV DPR Hardisoesilo

Dalam ajang kontes ternak Bondowoso yang dibuka bupati setempat Amin Said Husni itu, ratusan sapi dinilai tim juri untuk aspek kualitas dan kuantitas sapi yang dilombakan. Aspek kualitas antara lain mencakup warna bulu, bentuk tubuh, proporsi leher dengan badannya dan lain sebagainya. Sedangkan penilaian untuk aspek kuantitas meliputi berat badan, lingkardada, panjang badan dan lainnya. Sementara untuk kategori jenis sapi yang dilombakan diantaranya adalah induk, induk lokal, calon kereman dan

kereman, pedet jantan, pedet betina dan kategori calon induk.

Ditempat yang sama, Bupati Bondowoso Amin Said Husni menuturkan bahwa Bondowoso sudah lama dikenal sebagai daerah unggulan pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, menurut Amin, Pemda setempat berupaya untuk memfasilitasi beragam wahana yang bisa mendorong masyarakat terus produktif di bidang pertanian dan peternakan.

“Tentunya kita ingin mendorong masyarakat agar bersama pemerin-

tah menjawab tantangan kebutuhan nasional yakni swasembada pangan dan daging,” ujarnya.

Dampak Erupsi Gunung Raung

Sementara itu mengenai dampak erupsi Gunung Raung, Hardisoesilo menjelaskan bahwa abu vulkanis yang mulai menutupi areal persawahan masyarakat mulai menimbulkan persoalan tersendiri. Abu vulkanik itu banyak menempel di daun-daun tanaman pada lahan pertanian masyarakat.

“Banyak tanaman tembakau, hortikultura dan tanaman pangan lainnya di Bondowoso yang mulai tertutupi abu vulkanik Gunung Raung ini,” ujarnya.

Gunung Raung ditetapkan berada dalam status siaga sejak 29 Juni 2015 lalu. Erupsi gunung berapi yang berada di perbatasan tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Bondowoso, Jember dan Banyuwangi, ini telah memberikan beberapa dampak.

Dampak terbesar dari erupsi Raung ini dirasakan sektor ekonomi terutama pariwisata akibat diberlakukannya buka tutup sejumlah bandara, termasuk Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Lombok, Bandara Selaparang Lombok, Bandara Notohadinegoro Jember dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi. (as) foto: agung/parle/hr

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Daging



Ketua Komisi IV DPR Eddy Prabowo

Pedagang daging di sejumlah pasar tradisional baik di Jakarta maupun daerah sejak Senin hingga hari ini, masih melakukan mogok dagang. Aksi mogok ini dilakukan akibat tingginya harga daging sapi yang beredar di pasaran, sehingga mereka meminta kepada pemerintah untuk segera mencari solusi masalah ini.

Ketua komisi IV DPR Eddy Prabowo ketika dikonfirmasi terkait dengan mahalnya daging sapi, mengaku kaget dengan aksi mogok para pedagang tersebut.

“Saya sangat kaget dengan adanya aksi mogok para penjual dan pedagang daging sapi, akibat tingginya harga daging, yang mengakibatkan para pedagang mengalami kerugian,” jelas Eddy kepada wartawan di Ge-

dung DPR, Rabu (12/08/2015).

Eddy meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian terkait untuk segera mencari solusi dan memperbaiki tata kelola daging ini, sehingga para pedagang tidak mengalami masalah seperti ini.

“Kami mengharapkan agar pemerintah segera menertibkan tata kelola daging, dan juga dampak dari el Nino ini pemerintah harus benar-benar serius, dimana sebenarnya letak permasalahannya pemerintah harus secepatnya memperbaiki ini,” ujar Eddy.

Ketika ditanya apakah komisi IV DPR akan memanggil menteri pertanian, terkait dengan masalah ini? “Saya selalu melakukan komunikasi dengan Menteri Pertanian untuk membahas masalah ini, saya kira beliau melakukan komunikasi dengan sangat baik, dan berharap ada penyelesaiannya,” tegas politisi Gerindra ini. (as) foto: naefuroji/parle/hr

Pemda Harus Proaktif Usulkan Kebutuhan



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay saat pertemuan dengan Sekda Padang Sidempuan, Sumut

Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah daerah pro aktif usulkan kebutuhan masyarakat setempat kepada pemerintah pusat. Hal tersebut terungkap ketika Komisi VIII mengunjungi Padang Sidempuan, Senin (10/8).

“Dalam sejarah setahu saya baru pertama kali DPR RI secara resmi datang ke Tabagsel untuk menyerap informasi dan aspirasi baik dari Pemda setempat maupun dari masyarakat, meskipun secara pribadi anggota DPR di Dapil Sumut II seperti saya sudah berulang kali datang langsung ke lo-

kasi ini,” jelas Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay saat menyerap berbagai aspirasi masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Saleh mengatakan terkadang masyarakat enggan untuk mengadukan apa yang dirasakan salah satunya kemungkinan dikarenakan tidak adanya perubahan. Namun pada kesempatan itu di hadapan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII berbagai pertanyaan, harapan dan keinginan disampaikan masyarakat dan pemda setempat.

Salah satunya berasal dari Kepala

Dinas Sosial Tapanuli Selatan, Parulian Nasution yang mengadukan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di daerahnya. Padahal anggaran yang diberikan DPR kepada Kementerian Sosial meningkat tinggi. Bahkan di wilayah Tapanuli Selatan belum pernah mendapatkan KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

Menjawab hal itu Kementerian Sosial mengakui bahwa untuk wilayah Tapanuli Selatan selama ini belum mendapatkan KUBE dikarenakan belum ada usulan dari daerah tersebut. Namun dengan adanya usulan yang disampaikan dihadapan Komisi VIII tersebut, maka pihaknya akan mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran program KUBE 2016 untuk wilayah tersebut.

Bahkan pada kesempatan itu Margo, Direktur Bantuan Korban Bencana Alam Kementerian Sosial mengatakan bahwa pihaknya juga akan memberikan bantuan berupa motor (TRC) kepada 7 kabupaten di Tabagsel termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan ditambah 3 mobil untuk dapur umum.

“Ternyata berbagai program Kemensos itu didasarkan pada usulan dari daerah atau wilayah tersebut. Oleh karena itu saya berharap pemerintah daerah pun harus pro aktif untuk mengusulkan kebutuhan yang diperlukan daerahnya dari pemerintah pusat,” pungkas Saleh. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

DPR DUKUNG HAJI DAN UMRAH DIKELOLA SECARA KHUSUS

Untuk menyelesaikan persoalan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (PHU), kini Komisi VIII DPR RI sedang menggodok berbagai masalah ibadah haji dan umrah tersebut di Panitia Kerja (Panja). Baik mengenai tata kelola, manajemen, keuangan, tabungan haji, transportasi, pemondokan, catering, pendaftaran calon jamaah haji, dan sebagainya. DPR pun mendukung jika harus dikelola oleh badan atau kementerian khusus haji.

“Komisi VIII DPR RI pasti mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji

Indonesia (IPHI) agar pemerintah membentuk badan atau kementerian khusus haji, agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik dan transparan,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak dalam diskusi forum legislasi ‘RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah (PHU)’ bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan Pengurus MUI KH. Ali Mustofa Ya’qub, dan Wakil Ketua Umum PP IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) H. Anshori di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut politisi Golkar itu, selama ini

dalam pelaksanaan ibadah haji ternyata sering bermasalah meski sudah diatur UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, dan UU No.34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, Peraturan Menteri Agama (PMA) RI, yang melarang berangkat haji bagi yang orang sudah menunaikan ibadah haji dan lain-lain. Soal daftar tunggu misalnya untuk di Jawa sampai selama 17 tahun, Sulawesi Selatan 30 tahun, Sumatera 27 tahun dan lain-lain.

Selain itu kata Deding, juga mengatur Dana Abadi Umat (DAU) yang mencapai ratusan triliun rupiah bagaimana



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak dalam acara Forum Legislasi

uang itu kembali kepada umat (devi-den), pengelolaan keuangan haji, aspek kelembagaan, tata kelola dan lainnya agar lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Sebab, selama ini Kemenag RI menjadi operator, regulator, dan eksekutor, sehingga cukup berat. “Kalau DPR RI sebagai pengawas melalui jalur kedutaan besar, bukan Kemenag RI,” ujarnya.

Badan haji itu seperti di Turki, bertanggung jawab terhadap tujuh kementerian, dan kuota dibagi kepada semua travel sehingga terjadi persaingan yang sehat. “Di Malaysia pakai tabung haji, tapi antriannya sama sampai puluhan tahun. Bahkan ada yang 80 tahun, selain itu, juga mengenai penggunaan uang haji; rupiah, dollar AS, atau riyal? silakan pemerintah yang menetapkan. Demikian pula soal transportasi, seharusnya bukan saja Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airline,” tambahnya.

Soal kontrak pemondokan dia berharap pemerintah bisa melakukan minimal selama 5 tahun. “Kontrak kita selama ini memang dilemahkan secara sepihak. Karena itu, dengan semua aturan perundang-undangan itu nanti bisa disinergikan atau dibentuk badan atau kementerian tersendiri, agar pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik, bertanggung jawab dan hajinya diterima oleh Allah SWT, *mabrur*,” pungkasnya.

Sementara itu, Ali Mustofa Ya'qub

menilai ibadah haji bagi masyarakat Indonesia masih menjadi kebanggaan, sehingga selalu menjadi predikat untuk bisa diketahui secara luas. “Nabi saja satu kali haji dan dua kali umroh. Kalau terus dibanggakan dan merasa hebat kalau sering berhaji, berarti Nabi Muhammad tidak hebat? Umroh saja pada bulan Ramadhan 1436 H/2015 lalu sampai 8 juta orang, sedangkan 117 juta rakyat masih miskin, apa kita ini tidak dzalim? Belum lagi yang daftar tunggu sampai 30 tahun. Itulah yang harus dibenahi,” katanya.

Menurut Mustafa Ya'qub memang banyak yang harus dibenahi. Termasuk haji badal (pengganti haji), juga harus diatur. Sebab, ada yang protes satu orang bisa mewakili kedua orang tuanya atau lebih, rombongan amirul haj (petugas haji) cukup 5 orang bukan 35 orang. “Ada jamaah yang berangkat melalui Kemenag RI dan Kedubes RI, ketika ada jamaah haji di luar Kemenag RI, bermasalah akan menjadi tanggung jawab siapa? Jangan saling lempar tanggung jawab. Juga, dana abadi umat (DAU) itu milik umat atau negara? semua harus dibenahi,” tuturnya.

Ditempat yang sama Anshori dari IPHI mengingatkan jika harus disinergikan antara UU No.13 tahun 2008, UU No 17 tahun 2008 tentang tabungan haji dan UU No.34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan aturan haji lainnya, karena ada benturan soal

keuangan terkait otoritas Menag RI yang sangat tinggi. “Disinilah kalau tidak hati-hati, yang mengharuskan Menag RI berhadapan dengan KPK. Karena itu harus disinergikan. Juga, apakah badan atau kementerian haji, tapi tetap di bawah pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” jelasnya.

Mengapa? Kata Anshori untuk daftar tunggu saja sudah mencapai 2 juta lebih, kalau tidak diatur nanti kantor Kemenag RI menjadi Mina II akibat antrian itu. Karena itu harus dibuat moratorium untuk menghentikan tabungan haji, nanti boleh orang menabung tapi tidak terkait pemberangkatan haji atau Siskohat. Apalagi di Jawa Timur ada orang tua yang sudah mendaftarkan bayinya, agar ketika berusia 33 tahun bisa berangkat haji.

Selain itu, ada dana optimalisasi haji Rp 3 triliun lebih, tabungan masyarakat Rp 100 triliun dari DAU dan sebagainya. “Semua ini harus dibenahi, petugas juga sampai tiga ribuan orang. Di Malaysia petugas pakai seragam petugas bukan pakaian ihram sehingga konsentrasi sebagai petugas. Tapi, di Indonesia pakai baju ihram maka sibuk berhaji. Jadi, perlu dibentuk badan atau kementerian haji agar mengelola haji secara profesional,” pungkasnya. (nt/sc) foto: andri/parole/od

Komisi V Sayangkan Berlarut-larutnya Kasus Sengketa Tanah Bandara Pattimura



Tim Kunker Komisi V DPR saat pertemuan dengan Otoritas Bandara Pattimura

Kekalahan pihak Angkasa Pura I (AP I) dalam persidangan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa kepemilikan lahan Bandar Udara Pattimura dengan masyarakat adat Negeri Laha Kecamatan Leihtu Barat Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu topik diskusi saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau sarana dan prasarana Bandara Pattimura Ambon, Kamis (6/8/2015).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena menyayangkan berlarut-larutnya kasus sengketa tanah yang melibatkan pihak AP I, TNI AU dengan masyarakat. Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan seharusnya persoalan tanah ini dari dulu sudah dituntaskan baik oleh pihak AP I maupun dari sisi TNI AU.

"Tetapi karena masalah ini sudah masuk jalur hukum maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai warga negara yang taat hukum harus mengikutinya, karena semua orang di mata hukum adalah sama tidak ada perbedaan, dan apapun keputusannya kita serahkan kepada mekanisme dan hukum yang berlaku, apalagi saat ini sudah sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di MA," tukas Michael.

Politisi Dapil Papua Barat ini mengharapkan penyelesaian yang terbaik, disatu sisi masyarakat mendapatkan keadilan dan kebenaran sedangkan bagi pihak AP I dan TNI AU juga memperoleh kepastian hukum menyangkut

kepemilikan tanah Bandara Pattimura. "Bandara Pattimura memiliki nilai strategis di wilayah Timur Indonesia karena sebagian penerbangan menuju Papua melalui jalur transit di sini, jadi apapun keputusan PK di MA nantinya jangan sampai mengganggu proses pelayanan transportasi udara di Bandara Pattimura," pesan Michael.

Senada dengan Michael, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menilai jika persoalan kasus sengketa tanah di Bandara Pattimura Ambon itu antara Pemerintah (AP I, TNI AU) dengan masyarakat adat sudah masuk ke ranah hukum maka Komisi V tidak bisa berbuat banyak.

Politisi Gerindra ini menambahkan bahwa persoalan sengketa tanah bukan hanya di Bandara Pattimura Ambon saja tapi hampir di semua wilayah. Ada yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (seperti di Ambon) atau bahkan antara pemerintah dengan pemerintah (pihak AP dengan TNI AU).

"Jika sengketa terjadi antara pihak Angkasa Pura dengan TNI AU kita harapkan ada ketegasan dari pemerintah," pinta Fary. Hal ini mengingat fungsi Vital Bandara sebagai pintu gerbang sebuah provinsi. Pihaknya juga mendorong adanya mediasi setelah keluar keputusan dari PK, siapapun yang menang diharapkan memenuhi rasa keadilan dan semuanya bisa menerima karena bagaimanapun pelayanan Bandara harus tetap jalan.

"Harus ada langkah-langkah antisipatif karena Bandara ini kan masuk kategori area vital. Apakah jika kalah akan memilih pindah atau dengan membayar ganti rugi atau dicari alternatif lain dimana wilayah Ambon ini yang demografinya kepulauan memiliki keterbatasan lahan," pesan Fary.

Sementara itu, dari penelusuran Parlemen melalui website Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dalam Sistem Informasi Manajemen Konflik Pertanahan/Agraria di situs www.konflikagraria.ditjenpum.go.id ditemukan penjelasan kasus sengketa tanah yang melibatkan AP I, TNI AU dan masyarakat negeri Laha terkait tanah Bandara Pattimura.

Sengketa tanah sudah berlangsung sejak tahun 2005 antara warga Laha dan pemerintah Negeri Laha dengan TNI Angkatan Udara. Konflik terjadi ketika Pengadilan Negeri Ambon memproses gugatan kepemilikan tanah antara TNI AU dengan Negeri Hattu, kecamatan Leihtu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Warga Laha berpendapat bahwa lahan seluas 251 hektar yang disengketakan dengan TNI -AU adalah milik mereka dan Hattu tidak memiliki petuanan (areal tanah) hingga ke Bandara. Menurut Raja Negeri Laha, Said Laturua Lahan seluas 251 hektar ini adalah hak ulayat warga Laha yang dipinjam pakaikan kepada TNI-AU sejak tahun 1953 untuk jangka waktu 30 tahun dan berakhir tahun 1983, dan hingga saat ini sengketa lahan dengan TNI-AU belum diselesaikan.

Lahan tersebut kemudian digunakan PT. Angkasa Pura untuk mengoperasikan Bandara Internasional Pattimura yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.38 Tahun 1995 yang menetapkan aset Bandara Pattimura Ambon menjadi bagian Penyertaan Modal Negara dalam modal PT (persero) Angkasa Pura I. Keluarnya PP No.38/1995 maka tanah Bandara Pattimura Laha-Ambon bukan lagi menjadi Aset Dephan/TNI c.q TNI-AU. (od) foto: naefuroji/parle/od



Komisi V DPR Dorong Percepatan Pembangunan Maluku Tengah

Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) bisa berkembang lebih cepat bila dukungan infrastrukturnya memadai. Demikian diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat Kunjungan Kerja Reses didampingi Bupati Malteng Tuasikal Abua dan Wabup Marlatu Leleury beserta jajaran Forkopinda, Pimpinan SKPD, Badan dan Kantor di lingkup Pemkab Malteng, Jum'at (7/8/2015).

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Malteng selaku Kabupaten tertua di Provinsi Maluku. "Sarana Pelabuhan Amahai, Bandar Udara Amahai, Dermaga Feri Kawasan Ina Marina Masohi, Instalasi Pengolahan Air Minum dan sejumlah fasilitas publik lainnya yang merupakan proyek dengan dana APBN di Malteng patut dipercepat dan ditingkatkan," ungkap Fary.

Politisi berdarah Saparua ini menambahkan bahwa percepatan berbagai proyek infrastruktur tersebut untuk mendorong pengembangan Kabupaten Malteng secara menyeluruh. "Pelabuhan Amahai misalnya, sudah harus diperlebar dan diperpanjang lagi. Dermaga Feri juga demikian. Lapangan Terbang Amahai yang saat ini kurang terurus dan hanya memiliki panjang landasan 750m bisa ditingkatkan minimal menjadi 1250m agar pesawat jenis ATR bisa mendarat dan menjadi pintu masuk jalur udara ke Kabupaten Malteng," jelas Fary.

Disisi lain, peningkatan layanan air bersih untuk sambungan rumah melalui PDAM, peningkatan status jalan-jalan provinsi dari segi kualitas dan cakupan wilayahnya menjadi jalan nasional agar bisa didanai oleh APBN juga menjadi



Tim Kunker Komisi V DPR saat meninjau proyek infrastruktur di Maluku Tengah

perhatian merujuk pada hasil tinjauan lapangan Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI.

Namun demikian, agar berbagai proyek infrastruktur tersebut berjalan lancar, Ketua Tim Kunker Reses Komisi V DPR ini berharap persoalan pembebasan lahan untuk kawasan pembangunan sarana publik harus beres dan tidak ada masalah. "Kita bersama Kementerian Mitra Komisi V DPR RI akan mendorong pembahasan anggaran agar secepatnya bisa direalisasikan. Yang terpenting tidak boleh ada persoalan lagi dengan status lahan yang

akan dijadikan lokasi pembangunan," tandasnya.

Secara terpisah, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menyambut positif Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dan mengapresiasi dukungan politik tersebut karena sangat dibutuhkan untuk mengembangkan Maluku Tengah. "Soal status tanah di Pelabuhan Amahai, Dermaga Feri Ina Marina dan lokasi pembangunan sarana publik lainnya dijamin tidak ada masalah," tegas orang nomor satu di Malteng ini. (Od) foto: [naefuroji/parle/od](#)

Komisi X DPR Akan Usahakan Dana Rehabilitasi Sekolah Rusak

Komisi X DPR akan memperjuangkan adanya dana rehabilitasi dalam RAPBN 2016 bagi sekolah-sekolah rusak di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

juga diminta untuk terjun langsung meninjau sekolah yang rusak.

"Saran saya, Kemendikbud turun langsung ke lapangan sehingga dapat cepat bertindak," kata ketua Tim Kun-

jungan Kerja Komisi X DPR, Nuroji, usai meninjau SMAN 1 Kupang Timur, SMPN 1 Kupang Timur, dan SDN Kelapa Tinggi Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, Senin (10/08/15) sore.



Tim Kunker Komisi X DPR mengunjungi SMAN I Kupang Timur, NTT

Nuroji yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi X (F- Gerindra) ini menyatakan prihatin dengan kondisi sekolah-sekolah di NTT. Sekolah-sekolah tersebut mengalami kerusakan

yang cukup berat, diantaranya plafon hancur, kaca jendela pecah sehingga diganti dengan potongan bambu.

“Begitu pula alat sekolah termasuk perlengkapan laboratorium sudah ti-

dak berfungsi. Ada juga sekolah yang masih berlantai tanah, sehingga kalau hujan karena atap bocor kondisinya becek,” prihatin politisi asal Dapil Jawa Barat VI ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Petrus Manuk, mengaku sengaja membawa Tim Kunker Komisi X DPR ke sekolah yang rusak, supaya ada perhatian pemerintah pusat sehingga dana cepat digulirkan.

“Apalagi, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste perlu berbagai fasilitas pendukung yang memadai sebagai wilayah penjaga perbatasan NKRI,” tandas Petrus.

Petrus berharap kepada Tim Kunker Komisi X DPR agar anggaran pendidikan yang sebesar 20 persen dari APBN atau sekitar Rp 340 triliun bisa didistribusikan secara merata dan berkeadilan sehingga bisa memperbaiki sekolah rusak, sehingga nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. (mp) foto: mastur prantono/parle/hr

PERLU AKSELERASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI NTT



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Nuroji serah terima cinderamata dengan Rektor Undana, Kupang

Komisi X DPR menekankan perlunya akselerasi pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste ini, jenjang pendidikan dasar dan menengah menghasilkan perolehan nilai UN rendah. Sementara untuk perguruan tinggi selain minim anggaran juga minim fasilitas.

Demikian mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Nuroji dengan kalangan Perguruan Tinggi di Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT, Selasa (11/08/15).

Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore menyatakan, untuk mempercepat pembangunan pendidikan di NTT perlu akselerasi khusus, tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

“Misalnya untuk bangun 1 ruang kelas di Pulau Jawa perlu dana Rp 1 juta tapi di NTT, dana segitu tidak cukup membangun 1 ruang kelas,” kata Jefri.

Selain itu, tambah Politisi F-PD ini, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagian besar hanya untuk gaji guru dan dosen, sementara sisanya tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga.

“Yang dimanfaatkan untuk kepentingan dan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, hanya sekitar Rp 80 triliun. Khusus untuk Perguruan Tinggi, anggarannya kecil sekali,” sesal Politisi asal Dapil NTT ini.

Dalam dialog ini, Komisi X menerima beberapa keluhan seperti kurangnya fasilitas, terbatasnya jumlah dosen dan juga minimnya besaran tunjangan.

Keluhan lain, kebijakan izin belajar para dosen dibatasi jarak 60 kilometer. Dengan kebijakan itu, maka dosen dari NTT tidak bisa belajar di Pulau Jawa.

“Kebijakan ini tidak fair dan tidak masuk akal. Kami akan bicarakan dengan Kemenristekdikti. Ini perlu ditinjau lagi,” tandas Anggota Komisi X Isma Yatun. (mp) foto: mastur prantono/parle/hr

SULBAR PERLU TAMBAHAN GURU



Tim Kunker Komisi X DPR RI saat meninjau SDN I Mamuju

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan, perlu ada perhatian khusus dari Menteri Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa memberikan tambahan PNS Guru dan memberikan keleluasaan untuk mengangkat guru-guru *outsourcing* atau guru-guru bantu, karena ini akan mempercepat peningkatan sumber daya manusia di daerah yang pemekaran seperti ini.

Selain tambahan guru, perlu ada pengembangan sumber daya manusianya baik untuk dosen maupun guru-gurunya, guna mengembangkan dan memajukan pendidikan muatan lokal.

Kunjungan kerja Komisi X DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka reses masa persidangan IV Tahun Si-

dang 2014/2015 melakukan peninjauan kesejumlah sekolah di Mamuju, ibukota Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (11/8)

Komisi X yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Perpustakaan Nasional, berharap agar Pemerintah Daerah memperhatikan kondisi-kondisi sekolah yang ada, baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK, termasuk masih banyaknya sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru.

“Indonesia memang di mana-mana masih kekurangan guru, tapi mungkin di daerah-daerah yang baru seperti ini, harus mendapatkan perhatian, karena kalau di Jawa misalnya kekurangan guru bisa di *handle* oleh tenaga yang diperbantukan. Tapi kalau untuk

daerah-daerah seperti ini rekrutmen guru itu tidak gampang,” ungkap Mujib usai kunjungan ke SD I Mamuju, SMP 2 Mamuju dan SMU I Mamuju.

Menyinggung tentang kearifan lokal, Sulbar adalah daerah yang spesifik, yaitu penghasil kakao, ikan, dan lain sebagainya, sehingga sekolah-sekolah kejuruan menjadi satu hal yang penting.

“Tahun 2007 sudah ada Sekolah Kejuruan Kakao, tapi kabarnya tidak berjalan baik. Maka dari itu perlu penangan serius untuk pengadaan tenaga pengajar yang memang benar ahli kakao dan sosialisasi pada masyarakat supaya lebih sadar akan daerahnya, sehingga sekolah maju menjadi sekolah unggulan dengan khas muatan lokal,” ujar Mujib. (ray) foto: rizka/parle/hr

Firman Subagyo : Gejolak Daging Sapi Skenario Mafia

Gejolak yang terjadi pada harga daging sapi di pasaran beberapa hari terakhir ini, menurut Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo adalah skenario dari para mafia, sama persis yang terjadi pada Kedelai pada tahun 2013 lalu.

“Hal ini persis seperti yang terjadi pada komoditi Kedelai beberapa waktu lalu. Dimana ujung-ujungnya agar pemerintah mengeluarkan ijin impor daging sapi. Ketika *demand*-nya tinggi dan suplaynya dikendalikan mafia sudah pasti



Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo

akan terjadi gejolak harga,” tegasnya kepada Parlemen di Gedung DPR RI, Senin (10/08/2015).

Menurut Firman, jika saja pemerintah mau melaksanakan amanat UU Pangan dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Nakeswan), kemungkinan hal ini tidak akan terjadi. Kedua UU tersebut, sudah sangat jelas untuk menuju swasembada dan kedaulatan pangan. “Hanya yang menjadi persoalannya sampai saat ini pemerintah tidak mau melaksanakan UU tersebut,” ungkapnya.

“Mengapa hal ini terjadi?,” tegas politisi Partai Golkar ini. Menurutnya, karena ada oknum yang bermain di pemerintahan ikut memanfaatkan terhadap karut marutnya ketahanan pangan. “Karena yang namanya komoditi pangan ini adalah menjadi obyek besar yang menjanjikan. Lihat saja,

produksi beras kita 3,5 juta ton setiap tahunnya, kalau kita ambil untung Rp1.000 saja per kilogram berapa triliun keuntungan yang akan diraup,” paparnya.

Selanjutnya Firman menjelaskan, bahwa pemerintah tidak pernah mempunyai data yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu data neraca kebutuhan nasional daging kita, berapa kebutuhan nasional daging perkuartal dan pertahun. Kemudian, data tentang produksi nasional kita, serta berapa kemampuan peternak-peternak lokal dan perusahaan pemotongan hewan untuk menyuplai.

la menambahkan, jika saja kedua data ini ada, dan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dapat duduk bersama. Kita akan tahu berapa kebutuhan nasional per kuartal atau per triwulan, berapa produksi per kuartal dan pertahun, dan kita akan tahu berapa kebutuhan impor. Ini untuk jangka pendeknya.

“Untuk jangka panjangnya, agar Indonesia tidak bergantung pada impor. Dan kebijakannya sudah kita berikan regulasi. Didalam UU sudah jelas mengamanatkan segera buatlah pulau karantina seperti di Australia,” imbuhnya.

Kemudian, jelas Firman, pemerintah diamanatkan untuk segera bentuk Badan Usaha Milik Negara khusus memproduksi bibit-bibit sapi yang hasilnya didistribusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengusaha yang akan melakukan penggemukan.

“Namun perencanaan itu tidak ada dan tidak dilakukan pemerintah. Hal ini terjadi karena regulatornya yaitu pemerintah ada yang sudah ikut menikmati permainan mafia yang selama ini mungkin mendapatkan keuntungan,” tandas Firman. (sc) foto: [ivan armanias/parle/hr](#)

Koperasi Setjen DPR Harus Bisa Bersaing Dengan Pasar

Pendidikan Integrasi Koperasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi dan diikuti oleh pengelola, pengawas, pengurus, manajemen, maupun anggota Koperasi. Program kegiatan yang telah diselenggarakan secara reguler ini bertujuan untuk pengetahuan agar supaya ada pemahaman yang sama. Sehingga bagaimana koperasi dikembangkan dari dan untuk anggota.

Hal ini dikemukakan Sekjen DPR Winantuningtyastiti selaku Pembina Keperasi Setjen DPR pada saat membuka pendidikan perkopersian dan forum komunikasi anggota di ruang rapat Pansus C Gedung Nusantara II DPR Kamis (13/8) siang.

Sekjen DPR menambahkan, selama ini koperasi Setjen DPR masih perlu pembenahan, karena masih banyak protes dan kritik dari anggota yang

ditujukan ke pengurus koperasi. Maka dari itu dilakukan Pendidikan Integrasi Koperasi ini untuk menyusun suatu program koperasi.

Tema yang dipilih dalam pendidikan ini adalah tentang SPI (Sistem Pengendalian Internal), semuanya harus menyadari proses kerja harus dilakukan sesuai dengan data yang aktual dan benar agar bisa dipertanggungjawabkan ke semua anggota koperasi.

Sekjen DPR berharap, untuk ke depan koperasi dikelola dengan profesional dan diharapkan mempunyai tempat yang lebih baik. Mengingat tempat usaha koperasi sekarang ini masih terpisah-pisah belum menyatu. Pengurus, dan pengawas diminta lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan keikutsertaan anggota lebih banyak lagi.

Sementara itu Anggota DPR Fraksi Hanura Dadang Rusdiana selaku pem-



Anggota DPR Fraksi Hanura Dadang Rusdiana

bicara dalam pendidikan perkopersian tersebut mengemukakan, bahwa semua pihak dengan penuh tanggung jawab harus memajukan koperasi termasuk koperasi Setjen DPR, sebab disini banyak peluang yang dapat

dikembangkan.

Tinggal bagaimana kepedulian para pejabat serta anggota DPR, seluruh anggota Fraksi ini suruh ikut serta membesarkan koperasi ini. Secara ideologis para anggota DPR, dan pejabat ini, harus membuktikan bahwa koperasi ini adalah bentuk usaha pilihan paling sejalan dengan prinsip-prinsip ketika negara ini didirikan, bukan hanya menjadi slogan, maupun pidato saja.

Dadang Rusdiana mengatakan, saat ini sudah waktunya kembali kepada

khittah bangsa ini berdiri, Koperasi menjadi soko guru, menjadi alat pergerakan ekonomi di desa dan perkotaan. Selain itu dan membatasi ekspansi kapitalis, sistem alternatif perekonomian yang berlandaskan kekeluargaan. “Ini yang harus kita pertahankan, tegasnya. Dia menambahkan, dengan pendidikan koperasi ini, memudahkan menjadi cikal bakal untuk mengembalikan kesadaran betapa pentingnya koperasi ini.

Politisi Fraksi Hanura juga berharap

bahwa Koperasi Setjen DPR ini harus berkembang. Anggota Koperasi Setjen DPR dengan jumlah ribuan harus bisa bersaing dengan bisnis yang lain, selama ada kepedulian yang besar dari pejabat, Setjen di DPR ini. Karena kita bisa bersaing, tidak boleh kalah dengan Carrefour maupun yang lain, dan yang paling penting mempunyai spirit yang sama untuk membangun koperasi. (Spy) foto: jaka/parle/hr

Baleg Pantau Pelaksanaan UU PPP di DIY



Tim Kunker Baleg DPR dipimpin Wakil Ketua Totok Daryanto menggelar pertemuan dengan Wagub DIY

Badan Legislasi - Baleg DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau pelaksanaan UU no.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Kegiatan pemantauan ini diperlukan untuk mengetahui apakah produk legislasi yang telah disahkan DPR dapat berlaku secara efektif.

“Pemantauan dan peninjauan UU PPP dilakukan untuk mengetahui apakah UU ini telah terlaksana dengan baik, efektif atau tidak. Apakah delegasi pengaturan yang diperintahkan UU telah dilaksanakan atau belum dan kendala apa saja yang terjadi di daerah dalam pelaksanaannya,” kata Ketua Tim Kunker Totok Daryanto dalam pertemuan di Kantor Gubernur DIY di Yogyakarta, Rabu (13/8/15).

Ia menambahkan pemantauan dan

peninjauan difokuskan pada beberapa materi pokok diantaranya pembentukan peraturan pelaksana UU PPP khususnya di Provinsi DIY, sinkronisasi alat kelengkapan yang khusus menangani legislasi di daerah sebagaimana diatur dalam UU PPP dan UU Pemda.

Totok yang juga Wakil Ketua Baleg DPR kepada Wakil Gubernur DIY beserta jajaran menekankan masukan yang dihimpun akan menjadi bahan dalam menentukan politik perundang-undangan yang dituangkan dalam prolegnas, khususnya prolegnas prioritas 2016 serta rekomendasi bagi DPR dan pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam IX menyambut baik pilihan Baleg untuk melakukan pemantauan di provinsi yang terkenal dengan keelokan budayanya ini. Ia menyebut sejumlah masukan telah dihimpun

oleh jajaran aparat pemprov, DPRD serta akademisi dari Universitas Gajah Mada, Univ Islam Indonesia, Univ Muhammadiyah dan perguruan tinggi lain di DIY.

Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi DIY memberikan catatan kritis tentang lambatnya proses sinkronisasi sejumlah aturan perundang-undangan. Ia memberikan contoh sederhana tentang beragamnya penyebutan pejabat sementara di daerah.

“Perda menyebut pelaksana harian bupati/walikota, dalam UU ada penyebutan pejabat bupati/walikota, peraturan lain pelaksana tugas. Ini harus disinkronkan agar kami tidak bingung di daerah,” paparnya. Menurutnya masih banyak persoalan lain yang menunjukkan terlambatnya sinkronisasi setelah disahkannya munculnya aturan perundang-undangan baru.

Bicara pada kesempatan yang sama Purwanto dari Kanwil Kemenkumham meminta penjelasan tentang hirarki Peraturan Desa dalam UU no.12/2011. Pada pasal 7 dijelaskan jenis peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD NRI 1945, Tap MPR, UU, Perppu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. “Dimana posisi Peraturan Desa?” tanyanya.

Totok Daryanto menyampaikan apresiasi atas masukan terhadap pelaksanaan UU PPP yang berhasil dihimpun di DIY. Sejumlah anggota Baleg DPR mengikuti kunker kali ini diantaranya Jalaludin Rakhmat (FPDIP), Ichsan Firdaus (FPG), Jefirstson Riwu Kore (FPD) dan Ali Umri (FP Nasdem).

(iky) foto: ibnur khalid/parle/hr

Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Diharapkan Terus Meningkatkan

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan, berharap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus meningkat seiring investasi yang masuk.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggolo, Senin (10/8) di Palu. Pada 2015 ini, pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai dua digit, yaitu 17,76%. Itu angka pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Sebelumnya, pada 2014 Sulteng mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu 5,11%. Nilai investasi yang masuk hingga saat ini RP 1,7 Triliun, tertinggi keenam se-Indonesia. Anggota Komisi VI Eka Sastra (F-PG) menilai, walau angka pertumbuhan tersebut sangat tinggi, tapi kurang banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Menurut Eka, pertumbuhan yang berkualitas adalah yang banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, di balik pertumbuhan yang positif itu, Sulteng memiliki angka kemiskinan yang tertinggi pula di Indonesia yaitu 13%. Namun, Gubernur Sulteng yakin angka tersebut diupayakan bergerak turun. Kini sudah 11% dan akan terus menurun dalam 5 tahun mendatang.



Tim Kunker Komisi VI DPR saat pertemuan dengan Gubernur Sulteng

Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa anggota Komisi VI, Melani Leimena Suharli (F-PD), M. Nasim Khan (F-PKB), Eka Sastra (F-PG), Refrizal (F-PS), Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG), Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Mukhlis (F-PPP), dan Nurzahedi (F-Gerindra). (mh) foto: husen/parle/mh

PEMROV RIAU KURANG OPTIMAL PROMOSIKAN PARIWISATA



Tim Kunker Komisi X DPR saat pertemuan dengan jajaran Pemprov. Riau

Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani dari Fraksi PDIP menyoroti kinerja Pemrov Riau yang kurang optimal dalam menggolkan visi dan misi Pemerintah Riau yang ingin menjadi pusat budaya Melayu. selama ini, pemerintah Malaysia mengklaim sebagai salah satu pusat budaya Melayu.

“Pemerintah daerah harus rajin menyelenggarakan berbagai atraksi wisata seperti lomba baca pantun maupun promosi pariwisata yang gencar ke berbagai negara,” ujarnya saat mengadakan Kunker Komisi X DPR ke Pemrov Riau yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsyah baru-baru ini.

Menurutnya, Riau memiliki tujuan wisata yang menarik seperti wisata *surfing* yang terletak di sungai Bono. “Ini merupakan satu-satunya *surfing* di sungai namun dengan banyak lumpurnya,” paparnya.

Selain itu, pemerintah Daerah harus menangkap potensi pariwisata yang cukup besar di negara perbatasan, ada sekitar 67 juta jiwa turis berkegiatan di Singapura yang tujuannya memang ingin wisata sekaligus berolahraga. “Perlu ditingkatkan atraksi seperti jazz festival dan kunjungan religi apakah sudah ada event seperti itu,” tandasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah perlu juga mewajibkan siswa atau siswi darmawisata, karya wisata dan melakukan kampanye secara nasional agar menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa Indonesia.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Pemrov Riau, Fahmizal Usman menjelaskan Riau memiliki banyak potensi wisata yang bisa dijual. Bahkan menurut Fahmi potensi wisata di Riau tidak kalah dengan potensi yang ada di daerah lain. Namun saat ini kendalanya masih terhambat, karena minimnya dukungan infrastruktur. Karena itu, Fahmi minta dukungan pusat.

“Jadi kami di Riau ingin menjadikan daerah pusat Budaya Melayu dan Perekonomian di Asia Tenggara, kami juga minta dukungan Pemerintah pusat,” kata Fahmi.

Seperti diketahui, agenda Kunjungan Kerja Komisi X ke Riau ini salah satunya membahas masalah pariwisata dan Kebudayaan di Riau. Sesuai dengan *tag line* yang diluncurkan Riau “The Homeland of Melayu”. (Si) foto: Sugeng/parle/hr

Komisi X DPR Prihatin Angka Putus Sekolah Riau Tinggi



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau salah satu sekolah di Provinsi Riau

Komisi X DPR prihatin dengan kondisi Sektor pendidikan di Provinsi Riau, Pasalnya angka putus sekolah di Provinsi tersebut masih tinggi, selain itu, dari seluruh guru di Provinsi Riau masih ada sekitar 50 persen guru honorer yang harus jadi perhatian pusat maupun daerah.

Terdapat sekitar 135 ribu anak di Provinsi Riau yang mengalami putus sekolah, angka ini sangat miris dimana artinya Riau masih belum berhasil memperbaiki sistem pendidikan di Bumi Lancang Kuning tersebut.

“Saya sangat prihatin di Provinsi Riau angka putus sekolah masih tinggi,

selain itu, fasilitas pendidikan juga masih kurang. Seharusnya dengan semakin meningkatnya devisa daerah, Pemprov harus memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran untuk sektor tersebut,” papar Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati dari Fraksi PPP kepada Parleментарia.

Menurutnya, Riau termasuk provinsi yang memiliki potensi alam dan memiliki kekuatan besar di bidang pariwisata dan alamnya. “Riau juga memiliki program wisata yang mengedepankan sebagai pusat *home land of Melayu*, program itu harus fokus sehingga dapat menjadi andalan bukan hanya

untuk Riau tetapi Indonesia,” harapnya.

Sementara Ketua Komisi X DPR Teuky Riefky Harsya mengatakan, Komisi X DPR mendukung penuh program Pemerintah daerah Riau, terkait visi 2020 Riau. “Kita mengharapkan Riau juga dapat memberikan masukan terkait UU Kebudayaan karena Riau ini merupakan salah satu pusat kebudayaan Melayu, selain juga masukan di bidang pendidikan khusus kurikulum 2012, maupun ujian nasional,” jelasnya.

(Si) foto: Sugeng/parle/hr



Presiden RI Joko Widodo menyerahkan RAPBN 2016 kepada Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Rapat Paripurna pertama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Jumat (14/08)
Foto : Iwan Armanias/Parle/HR



Pembukaan Rapat Paripurna Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/08) Foto : Iwan Armanias/Parle/HR



Sekjen dan Wakil Sekjen DPR RI menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden RI di DPR RI Senayan untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan RAPBN 2016, Jumat (14/08)
Foto : Eka HIndra/Parle/HR